



## Evaluasi Kinerja Penegakan Protokol Kesehatan Oleh Anggota Posko Merdeka di Masa Covid-19 Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang

Iskandar Suhardi <sup>1\*</sup>, Mega Nugraha <sup>2</sup>, Sunarto Sunarto <sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Tamansiswa (UNITAS) Palembang, Indonesia

Email: [Iskandarsuhardi666@gmail.com](mailto:Iskandarsuhardi666@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [geganugraha@gmail.com](mailto:geganugraha@gmail.com) <sup>2</sup>, [sunarto@unitaspalembang.ac.id](mailto:sunarto@unitaspalembang.ac.id) <sup>3</sup>

**Abstract.** Iskandar Suhardi, *Evaluation of Health Protocol Enforcement Performance by Members of the Merdeka Post during the Covid-19 Period by the Palembang City Fire and Disaster Management Service. This study aims to analyze the Performance Evaluation of Health Protocol Enforcement by Members of the Merdeka Post during the Covid-19 Period by the Palembang City Fire and Disaster Management Service. The study used qualitative methods with data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The results of the study show that in the application of the health protocol itself in a combined unit of several elements and agencies, it has several weaknesses, first from the community side who really underestimates the Corona virus, then from the officers themselves there is still minimal knowledge in providing education about the importance of complying with health protocol. The enforcement of health protocols did not go as expected, based on the health protocol policy itself, because there were several aspects, where in fact not all people believed in the existence of the corona virus, some even said that this corona was just a political conspiracy and the like, so that officers had difficulty in enforcement of health protocols. In 2020-2021 the health protocol policy is going quite well, people still have fear and vigilance about the spread of the corona virus, but in the course of time and being supported by people who have been vaccinated 1 and 2, it makes people feel safer, so that strict adherence to simple wearing a mask is no longer obeyed, not to mention other things such as washing hands and so on. The implementation of this health protocol policy has many obstacles and the weak side is public awareness and the pros and cons regarding the presence or absence of the corona virus, so that some people do not obey the applicable rules, and this makes it difficult for officers to carry out the policies that have been determined. So in this case the officer must have the right technique or method so that the implementation process can be easier.*

**Keywords:** Evaluation, Personnel Performance, Covid-19

**Abstrak.** Iskandar Suhardi, Evaluasi Kinerja Penegakan Protokol Kesehatan oleh Anggota Pos Merdeka selama Masa Covid-19 oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Evaluasi Kinerja Penegakan Protokol Kesehatan oleh Anggota Pos Merdeka selama Masa Covid-19 oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan protokol kesehatan itu sendiri dalam satu unit gabungan dari beberapa elemen dan instansi, memiliki beberapa kelemahan, pertama dari sisi masyarakat yang benar-benar meremehkan virus Corona, kemudian dari petugas sendiri masih minim pengetahuan dalam memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Penegakan protokol kesehatan tidak berjalan sesuai harapan, berdasarkan kebijakan protokol kesehatan itu sendiri, karena ada beberapa aspek, di mana sebenarnya tidak semua orang percaya dengan adanya virus corona, bahkan ada yang mengatakan bahwa corona ini hanya konspirasi politik dan sejenisnya, sehingga petugas kesulitan dalam penegakan protokol kesehatan. Pada tahun 2020-2021 kebijakan protokol kesehatan berjalan cukup baik, masyarakat masih memiliki ketakutan dan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona, namun seiring berjalannya waktu dan didukung oleh masyarakat yang telah divaksinasi 1 dan 2 membuat masyarakat merasa lebih aman, sehingga kepatuhan ketat terhadap pemakaian masker sederhana tidak lagi dipatuhi, Belum lagi hal-hal lain seperti mencuci tangan dan sebagainya. Penerapan kebijakan protokol kesehatan ini memiliki banyak kendala dan sisi lemahnya adalah kesadaran masyarakat dan pro dan kontra terkait ada atau tidaknya virus corona, sehingga sebagian masyarakat tidak mematuhi aturan yang berlaku, dan hal ini menyulitkan petugas untuk menjalankan kebijakan yang telah ditentukan. Jadi dalam hal ini petugas harus memiliki teknik atau metode yang tepat agar proses pelaksanaannya bisa lebih mudah.

**Kata Kunci:** Evaluasi, Kinerja Personel, Covid-19

## 1. PENDAHULUAN

COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Corona yang menyerang saluran pernapasan. Penyakit ini pertama kali terdeteksi di Wuhan, Tiongkok, dan virus penyebabnya dinamakan SARS-CoV-2. Nama SARS-CoV-2 diberikan karena virus ini memiliki hubungan genetik dengan virus penyebab SARS (Sindrom Pernafasan Akut Berat) dan MERS (Sindrom Pernafasan Timur Tengah).

Meskipun SARS-CoV-2 bukanlah virus baru secara absolut, virus ini dapat mengalami mutasi yang menghasilkan susunan genetik baru. Dengan demikian, virus ini tetap tergolong dalam jenis virus yang sama, namun dengan variasi dalam susunan genetiknya. COVID-19, yang lebih dikenal secara umum sebagai Corona Virus, termasuk dalam keluarga besar virus yang dapat menyebabkan berbagai tingkat keparahan penyakit, mulai dari gejala ringan seperti pilek hingga kondisi yang lebih serius dan parah

Ada setidaknya dua jenis virus Corona yang diketahui dapat menyebabkan penyakit dengan gejala berat, yaitu **Middle East Respiratory Syndrome (MERS)** dan **Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)**. MERS dan SARS adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus Corona dengan dampak yang signifikan pada kesehatan pernapasan manusia.

**Middle East Respiratory Syndrome (MERS)** adalah penyakit yang pertama kali teridentifikasi pada tahun 2012 di Arab Saudi. Penyakit ini disebabkan oleh virus MERS-CoV, yang merupakan bagian dari keluarga virus Corona. MERS umumnya menimbulkan gejala pernapasan yang berat, seperti pneumonia, serta gejala sistemik seperti demam dan batuk. Penelitian menunjukkan bahwa MERS ditransmisikan dari unta ke manusia. Unta yang terinfeksi dapat menularkan virus ini melalui kontak langsung atau melalui aerosol dari produk pernapasan mereka.

**Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)** adalah penyakit yang diakibatkan oleh virus SARS-CoV, yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2003. SARS menyebabkan gejala pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk, dan kesulitan bernapas. Virus ini ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia. Kontak dengan hewan yang terinfeksi atau dengan produk hewan yang terkontaminasi dapat menyebabkan penularan virus ini kepada manusia.

**COVID-19** (Corona Virus Disease 2019) adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. COVID-19 menimbulkan gejala yang bervariasi, dari gejala ringan seperti batuk dan demam hingga gejala berat seperti pneumonia, sindrom pernapasan akut, dan kegagalan organ. Virus ini termasuk dalam keluarga virus Corona tetapi merupakan jenis baru yang

belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia.

Virus Corona, termasuk SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2, merupakan contoh penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat ditularkan dari hewan ke manusia. Penelitian menunjukkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia, sedangkan MERS ditularkan dari unta ke manusia.

Untuk COVID-19, meskipun banyak penelitian telah dilakukan, sumber penularan hewan hingga saat ini masih belum dapat dipastikan secara definitif. Penelitian terus berlanjut untuk mengidentifikasi hewan yang mungkin menjadi reservoir atau sumber penularan virus SARS-CoV-2 kepada manusia. Identifikasi hewan sumber penularan ini penting untuk memahami mekanisme penularan virus dan untuk mencegah wabah di masa depan.

Untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, salah satu langkah penting adalah penerapan *physical distancing* atau menjaga jarak fisik, yang dianjurkan untuk mempertahankan jarak sekitar 1 hingga 2 meter dengan orang lain. Langkah ini penting untuk meminimalisir kemungkinan penularan virus melalui droplet yang dapat tersebar saat seseorang berbicara, batuk, atau bersin.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Yuri, juru bicara Pemerintah, yang menyatakan bahwa dalam rangka memutus rantai penambahan kasus COVID-19, diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan PSBB dirancang untuk membatasi aktivitas sosial dan mobilitas masyarakat guna mengurangi interaksi yang dapat menyebabkan penyebaran virus. Langkah ini menjadi salah satu strategi utama dalam upaya penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 di Indonesia (Kompas.com, 2020).

Dalam menghadapi pandemi COVID-19, terutama di Kota Palembang, peran pemerintah dan berbagai lembaga terkait sangat krusial. Situasi yang tidak menentu mengenai kapan pandemi ini akan berakhir menuntut keterlibatan aktif dari berbagai pihak dalam upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus.

Salah satu lembaga penting dalam penanganan pandemi adalah **Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang**. Dinas ini memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Mereka tidak hanya bertanggung jawab atas tugas-tugas pemadam kebakaran, tetapi juga berkontribusi dalam penanganan bencana dan situasi darurat, termasuk dalam konteks pandemi.

Selain itu, **personil kepolisian dan Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja)** juga terlibat secara aktif dalam pengawasan dan penegakan protokol kesehatan, seperti menjaga kepatuhan terhadap pembatasan sosial dan penggunaan masker.

Sejauh ini, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Mereka menjalankan berbagai kegiatan yang mendukung upaya pencegahan COVID-19, seperti penyemprotan disinfektan di area publik, serta berkolaborasi dengan lembaga lain untuk memastikan implementasi protokol kesehatan yang efektif.

Peran aktif dan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum sangat penting untuk mengendalikan pandemi dan memastikan keselamatan masyarakat. Keterlibatan mereka dalam penanganan COVID-19 mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kesehatan masyarakat dan mendukung upaya nasional untuk mengatasi krisis ini.

Penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Kota Palembang menghadapi beberapa tantangan yang signifikan. Beberapa masalah utama yang dihadapi meliputi:

1. **Kedisiplinan Masyarakat:** Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya disiplin masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan. Banyak individu masih enggan untuk mengikuti aturan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mengikuti prosedur kebersihan yang dianjurkan. Hal ini menghambat efektivitas upaya pencegahan penyebaran virus.
2. **Keterbatasan Petugas Penegak Prokes:** Jumlah petugas yang ditugaskan untuk menegakkan prokes terbatas, dan mereka sering kali harus membagi waktu dengan kegiatan lain. Keterbatasan ini berdampak pada kemampuan mereka untuk melakukan pengawasan dan penegakan secara konsisten dan menyeluruh.
3. **Sarana Pendukung yang Tidak Memadai:** Sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung penegakan prokes masih belum sesuai harapan. Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan lembaga terkait lainnya sering kali harus mengandalkan fasilitas yang ada, yang mungkin tidak memadai untuk kebutuhan pengawasan dan penegakan prokes secara efektif.
4. **Kurangnya Sosialisasi:** Sosialisasi mengenai pentingnya protokol kesehatan masih tergolong minim. Walaupun COVID-19 adalah pandemi global yang baru, kurangnya penyuluhan dan edukasi yang memadai membuat sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami atau percaya pada keberadaan dan bahaya virus ini.
5. **Kondisi Masyarakat:** Ada bagian masyarakat yang masih cuek atau kurang peduli terhadap penerapan prokes, bahkan ada yang tidak percaya akan adanya virus corona. Perilaku ini menambah tantangan dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan.

6. **Kemampuan Personil:** Personil yang terlibat dalam penegakan prokes mungkin belum memiliki keahlian atau pelatihan yang memadai untuk menghadapi tantangan ini. Pengetahuan dan keterampilan yang terbatas dapat mempengaruhi efektivitas mereka dalam menerapkan dan mengawasi prokes.

Secara keseluruhan, penanganan pandemi COVID-19 memerlukan penyesuaian berkelanjutan dan upaya kolaboratif yang melibatkan semua elemen masyarakat serta pemerintah. Penguatan kapasitas petugas, peningkatan fasilitas dan sarana pendukung, serta peningkatan edukasi dan sosialisasi akan menjadi kunci dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan.

Untuk membatasi penelitian ini agar lebih fokus peneliti hanya menekankan pada Posko Merdeka saja, mengingat untuk membatasi waktu dan lebih memfokuskan riset. Maka dari dasar permasalahan tersebutlah peneliti ingin melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Kinerja Penegakan Protokol Kesehatan Oleh Anggota Posko Merdeka Di Masa Covid-19 Oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang”

## 2. LANDASAN TEORI

### Pengertian Evaluasi

Berikut adalah penjelasan dari beberapa definisi evaluasi yang dikutip dari berbagai sumber:

1. **Suchman (dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul, 2010, hlm. 56):** Evaluasi dipandang sebagai proses yang bertujuan untuk menentukan hasil yang telah dicapai dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Fokusnya adalah pada pencapaian tujuan melalui penilaian hasil yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. **Stufflebeam (dikutip oleh Arikunto, Jabar, & Abdul, 2010, hlm. 57):** Evaluasi didefinisikan sebagai proses yang mencakup penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan. Evaluasi dalam konteks ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan untuk membuat keputusan alternatif, sehingga membantu dalam menentukan langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya.
3. **Dimiyati & Mudjiono (2006, hlm. 19):** Evaluasi diartikan sebagai proses pemberian atau penentuan nilai pada objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Proses ini berfokus pada penilaian objek dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, untuk menentukan nilai atau kualitas objek tersebut.

## Kesimpulan dari Definisi Evaluasi

Evaluasi, secara umum, melibatkan beberapa elemen kunci:

- a. **Penentuan Hasil:** Menilai sejauh mana hasil kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Suchman).
- b. **Penyediaan Informasi:** Memberikan informasi yang relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan (Stufflebeam).
- c. **Penilaian Berdasarkan Kriteria:** Menilai objek atau kegiatan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan nilai atau kualitasnya (Dimiyati & Mudjiono).

Ketiga definisi ini menggambarkan bahwa evaluasi adalah proses yang integral untuk menilai pencapaian tujuan, memberikan informasi yang berguna untuk keputusan, dan menentukan nilai berdasarkan kriteria tertentu.

Menurut Arifin dan Zainal (2010, hlm. 45), evaluasi seharusnya dipahami sebagai suatu proses, bukan sekadar hasil atau produk akhir. Hasil dari evaluasi adalah penilaian terhadap kualitas suatu objek, yang meliputi aspek nilai dan arti dari objek tersebut. Evaluasi itu sendiri adalah kegiatan yang melibatkan penilaian dan pemberian nilai terhadap objek yang dievaluasi. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Purwanto dan Ngalim (2010, hlm. 57), yang menekankan bahwa evaluasi merupakan proses sistematis dan terencana. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada akhir suatu program sebagai penutup, tetapi juga pada awal, selama, dan setelah program berlangsung. Dengan demikian, evaluasi adalah kegiatan berkelanjutan yang integral dalam siklus program, memberikan penilaian yang konsisten dan berkesinambungan dari awal hingga akhir program

Secara umum, istilah evaluasi sering dibandingkan dengan istilah pemeringkatan dan penilaian, ketiganya berkaitan dengan upaya untuk menganalisis hasil kebijakan dari perspektif nilai. Evaluasi mengacu pada proses sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak suatu kebijakan atau program. Pemeringkatan, di sisi lain, biasanya berfokus pada penempatan atau peringkat objek evaluasi berdasarkan kriteria tertentu. Sementara itu, penilaian sering kali melibatkan pengukuran manfaat atau hasil dari kebijakan dengan cara yang lebih spesifik. Dunn (2003:608) menjelaskan bahwa informasi yang dievaluasi dalam konteks ini mencakup penilaian nilai atau manfaat dari hasil kebijakan yang relevan, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan relevansi kebijakan tersebut.

Evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menilai hasil dari penerapan kebijakan, dengan tujuan utama untuk mengukur sejauh mana tujuan kebijakan tersebut telah tercapai. Proses evaluasi sangat penting karena memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi dari kebijakan yang diterapkan, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang

memerlukan perbaikan atau penyesuaian di masa depan. Evaluasi kerja, sebagai bagian dari proses evaluasi, menjadi langkah akhir dalam siklus kerja yang memungkinkan penilaian kinerja individu atau tim terhadap capaian yang telah ditetapkan. Dengan adanya evaluasi kerja, pemimpin atau pihak yang berwenang dapat mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan hasil yang dicapai, sehingga dapat menjadi landasan untuk pengambilan kebijakan di masa mendatang. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas kerja dan mendorong peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Evaluasi kerja berperan penting dalam memberikan informasi berharga kepada para pemimpin dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan. Melalui hasil evaluasi, para pemimpin dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja serta mempertimbangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Evaluasi ini berfungsi sebagai umpan balik yang esensial, membantu memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien. Dengan demikian, evaluasi kerja tidak hanya menjadi langkah penutup dalam suatu proses, melainkan juga menjadi alat strategis yang mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berkelanjutan. Evaluasi ini memungkinkan adanya pembaruan dan penyempurnaan kebijakan berdasarkan data yang valid, menjadikannya instrumen penting dalam meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan..

Menurut pandangan Taliziduhu Ndraha, evaluasi dapat dipahami sebagai proses perbandingan antara realita yang diharapkan atau target yang telah ditentukan dengan fakta yang terjadi di lapangan (Ndraha, 1989:201). Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran yang diinginkan telah tercapai dengan mempertimbangkan kondisi fakta yang sebenarnya.

Kesimpulannya, evaluasi merupakan alat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya. Jika terdapat perbedaan antara apa yang direncanakan dan apa yang terjadi, evaluasi memberikan wawasan mengenai penyebab perbedaan tersebut. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya membantu dalam menilai pencapaian tujuan, tetapi juga dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa evaluasi terdiri dari empat karakteristik utama. Pertama, evaluasi terfokus pada nilai, yang membedakannya dari pemantauan. Evaluasi lebih menekankan pada penilaian dan berbagai aspek terkait penilaian. Kedua, evaluasi mencakup fakta dan nilai yang saling terinterpretasi, di mana fakta dan nilai menjadi tuntutan utama dalam

proses evaluasi. Ketiga, evaluasi berorientasi pada masa lalu dan masa sekarang, dengan fokus pada hasil yang telah dicapai di kedua periode tersebut, bukan berorientasi pada masa depan. Keempat, evaluasi memiliki dualitas nilai, yakni terkait dengan hasil yang dicapai serta teknik atau cara yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, evaluasi terbagi menjadi beberapa kriteria yang penting dalam menilai pencapaian tujuan. Salah satu kriteria tersebut adalah bagaimana jalan atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efisiensi merupakan kriteria kedua, yang berarti menjalankan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai, dengan mempertimbangkan tingkat usaha yang diperlukan. Ketiga, kecukupan menilai sejauh mana usaha yang dilakukan sudah cukup untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar mendukung pencapaian hasil yang diinginkan, dengan memperhitungkan efektivitas dan efisiensi dari usaha yang dilakukan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian dapat dipahami sebagai jalan untuk menemukan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi. Sesuai dengan tujuan penelitian, jenis penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada dasarnya berfokus pada pengamatan terhadap orang lain di dalam lingkungan hidup mereka, berinteraksi dengan mereka, serta berusaha memahami bahasa dan interpretasi mereka tentang dunia di sekeliling mereka. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan keadaan secara menyeluruh, baik itu lingkungan, manusia, maupun proses kerja, sebagaimana adanya.

Oleh karena itu, laporan penelitian ini akan memuat kutipan-kutipan data yang memberikan gambaran menyeluruh terhadap objek yang diteliti. Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber seperti naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video, dokumen pribadi, dan dokumen lainnya. Peneliti kemudian akan melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap fenomena yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2012: 1), metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek yang berada dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan pada pemaknaan daripada generalisasi. Penelitian ini lebih mengedepankan proses, karena itulah metode ini sangat relevan untuk menganalisis fenomena yang terjadi secara aktual.

Dalam konteks penelitian tentang **Evaluasi Kinerja Penegakan Protokol Kesehatan oleh Anggota Posko Merdeka di Masa Covid-19 oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana**, pendekatan kualitatif ini sangat cocok karena penelitian tersebut bertujuan untuk memahami proses penegakan protokol kesehatan yang terjadi di lapangan secara mendalam. Fokusnya adalah menggali makna dari perilaku dan tindakan para anggota posko dalam menjalankan tugas mereka selama masa pandemi, bukan sekadar untuk membuat generalisasi, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih spesifik dan mendalam mengenai efektivitas kinerja mereka.

#### **4. HASIL PENELITIAN**

##### **Evaluasi Kinerja Penegakan Protokol Kesehatan Oleh Anggota Posko Merdeka Di Masa Covid-19 Oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang**

###### **Terfokus pada nilai**

Evaluasi memiliki perbedaan mendasar dengan pemantauan, terutama karena evaluasi lebih terfokus pada penilaian dan aspek yang berkaitan dengan nilai. Dalam konteks penelitian yang menggabungkan teori evaluasi dengan hasil lapangan terkait penegakan protokol kesehatan (Prokes), terdapat beberapa kelemahan yang diidentifikasi.

Pertama, dari segi masyarakat, banyak yang masih menganggap remeh bahaya virus Corona, sehingga tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan masih rendah. Hal ini menjadi tantangan besar dalam penegakan kebijakan kesehatan publik. Kedua, dari sisi petugas, masih terdapat keterbatasan pengetahuan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengikuti Prokes. Minimnya pemahaman ini berpengaruh terhadap efektivitas penegakan aturan, karena petugas seringkali kesulitan menjelaskan alasan-alasan di balik kebijakan tersebut dengan baik kepada masyarakat.

Evaluasi dalam hal ini menunjukkan bahwa, untuk memperbaiki kondisi, dibutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat serta pelatihan lebih lanjut bagi petugas terkait pemahaman dan metode penyampaian edukasi protokol kesehatan

###### **Fakta Nilai Terinterpretasi**

Pada indikator **Fakta dan Nilai Terinterpretasi**, tuntutan evaluasi terletak pada bagaimana fakta di lapangan sesuai atau tidak dengan nilai-nilai yang ingin dicapai melalui kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, penegakan **protokol kesehatan (prokes)** tidak berjalan sesuai harapan, terutama karena adanya perbedaan persepsi antara kebijakan yang ditetapkan dan realitas di lapangan.

Fakta menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mempercayai keberadaan virus Corona. Sebagian bahkan menganggap bahwa pandemi ini adalah hasil dari **konspirasi politik** atau isu lain yang tidak berhubungan dengan kesehatan. Akibat dari pandangan ini, masyarakat cenderung mengabaikan protokol kesehatan, yang berujung pada rendahnya tingkat kepatuhan.

Hal ini menyebabkan petugas yang ditugaskan untuk menegakkan prokes menghadapi berbagai kesulitan. Salah satu tantangan utamanya adalah memberikan pemahaman dan meyakinkan masyarakat mengenai pentingnya protokol kesehatan, mengingat adanya resistensi yang muncul dari ketidakpercayaan terhadap kebijakan tersebut. Situasi ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penegakan prokes, diperlukan pendekatan yang lebih intensif dalam edukasi serta komunikasi yang lebih strategis untuk menjembatani gap antara kebijakan dan realitas sosial.

### **Berorientasi Pada Masa Lalu Dan Sekarang**

Pada indikator **Berorientasi Pada Masa Lalu dan Sekarang**, evaluasi lebih menekankan pada penilaian hasil kebijakan yang telah diterapkan di masa lampau dan kondisi saat ini, tanpa berfokus pada prediksi masa depan. Dalam penelitian ini, peninjauan terhadap perubahan kondisi selama pandemi dari tahun 2020 hingga 2022 menjadi penting untuk memahami bagaimana kebijakan **protokol kesehatan (prokes)** berkembang dan dipatuhi oleh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada awal pandemi, yakni tahun 2020 hingga 2021, kebijakan prokes berjalan relatif efektif. Pada periode tersebut, masyarakat masih memiliki ketakutan dan kewaspadaan tinggi terhadap penyebaran virus Corona, yang mendorong mereka untuk lebih patuh dalam menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah vaksinasi tahap 1 dan 2 mulai dilaksanakan, terjadi perubahan perilaku di masyarakat. Banyak yang merasa lebih aman setelah divaksin, sehingga tingkat kepatuhan terhadap prokes menurun. Salah satu tanda penurunan ini adalah kebiasaan sederhana seperti **memakai masker** yang tidak lagi dipatuhi oleh sebagian besar masyarakat. Begitu pula dengan kebiasaan mencuci tangan dan menjaga jarak yang juga mulai diabaikan.

Situasi ini menunjukkan adanya **penurunan rasa kewaspadaan** di tengah masyarakat, yang berdampak pada efektivitas kebijakan prokes saat ini dibandingkan dengan awal pandemi. Fenomena ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh untuk mengidentifikasi langkah-

langkah yang harus diambil guna memulihkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap prokes, meskipun sudah ada kemajuan dari sisi vaksinasi.

### **Dualitas Nilai**

Pada indikator **Dualitas Nilai**, evaluasi menekankan dua aspek penting: **hasil** dan **teknik atau cara**. Hasil berkaitan dengan apakah sesuatu dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sedangkan teknik atau cara mencakup bagaimana suatu kebijakan atau tindakan dilakukan untuk mencapai hasil tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan protokol kesehatan (**Prokes**) menghadapi banyak kendala, terutama terkait dengan kesadaran masyarakat. Banyak masyarakat yang masih meremehkan risiko virus Corona, bahkan ada yang berpandangan bahwa virus ini adalah **konspirasi** atau sekadar isu politik. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap aturan Prokes yang berlaku, seperti tidak memakai masker atau mengabaikan langkah-langkah pencegahan lainnya. Situasi ini jelas mempersulit petugas yang bertanggung jawab untuk menegakkan kebijakan tersebut, karena harus berhadapan dengan resistensi masyarakat.

Dalam konteks dualitas nilai, **hasil** yang diharapkan adalah kepatuhan masyarakat terhadap Prokes, tetapi pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh **cara** petugas dalam melaksanakan kebijakan. Petugas perlu memiliki teknik atau pendekatan yang tepat untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya, selain penegakan aturan, dibutuhkan pendekatan yang lebih persuasif, edukatif, dan komunikatif agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya Prokes dan mendukung pelaksanaannya.

Dengan demikian, **teknik yang digunakan** oleh petugas sangat berperan dalam memudahkan proses pelaksanaan kebijakan, terutama dalam menghadapi kendala terkait ketidakpatuhan masyarakat. Evaluasi ini menyoroti bahwa upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan memerlukan penyesuaian cara atau metode agar kebijakan lebih efektif diimplementasikan di lapangan.

### **Faktor Pendukung Dan Penghambat**

#### **Kerjasama Tim**

Dalam pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes), yang melibatkan berbagai lembaga pemerintahan seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan pemadam kebakaran (Damkar), kerja sama tim atau team building memainkan peran yang sangat penting. Kerja sama tim adalah proses strategis yang dirancang untuk mencapai visi dan misi lembaga dengan cara bekerja secara kreatif, menggunakan komunikasi yang efektif, dan memecahkan masalah secara bersama-sama.

Hasil penelitian menegaskan bahwa kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja sama dalam tim adalah kunci utama keberhasilan pelaksanaan Prokes. Mengingat bahwa pelaksanaan Prokes melibatkan banyak pihak dari berbagai lembaga dengan latar belakang dan fungsi yang berbeda, koordinasi yang efektif antar anggota tim sangat diperlukan. Kerja sama yang baik memungkinkan berbagai unsur lembaga untuk bekerja sinergis, memastikan bahwa semua aspek protokol kesehatan dapat diterapkan secara efektif.

Personil Damkar Pos Merdeka, sebagai salah satu elemen kunci dalam implementasi Prokes, menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi dan kerja sama tim yang solid merupakan faktor krusial dalam keberhasilan penegakan kebijakan ini. Kerja sama yang baik antara Damkar dan lembaga lain memungkinkan mereka untuk menghadapi tantangan dengan lebih efisien, mengatasi masalah yang muncul, dan memastikan bahwa Prokes diterapkan secara konsisten di lapangan.

Dengan demikian, keberhasilan dalam pelaksanaan Prokes sangat dipengaruhi oleh seberapa baik tim dari berbagai lembaga dapat bekerja sama. Kerja sama yang efektif tidak hanya meningkatkan kemampuan untuk mengatasi tantangan tetapi juga memperkuat keseluruhan strategi pelaksanaan Prokes, memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat menjalankan peran mereka dengan optimal

## **2. Kebijakan Pemerintah**

Dari hasil penelitian, dapat ditarik pemahaman bahwa petugas protokol kesehatan (Prokes) yang terlibat dari Dinas Damkar Pos Merdeka memainkan peran kunci dalam memperkuat dan memperlancar pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan di Kota Palembang. Kekuatan utama petugas Prokes terletak pada kemampuannya untuk mengimplementasikan dan menegakkan kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Petugas dari Dinas Damkar Pos Merdeka memiliki peran strategis dalam menegakkan kebijakan prokes karena mereka beroperasi di garis depan dalam melaksanakan arahan dan peraturan yang ditetapkan. Mereka tidak hanya bertugas untuk mengawasi dan memastikan bahwa protokol kesehatan diikuti, tetapi juga untuk berkoordinasi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif.

Melalui kerja sama dan koordinasi yang baik, petugas Prokes dari Damkar Pos Merdeka dapat mengoptimalkan penerapan kebijakan prokes, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan menghadapi tantangan yang muncul selama pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan dan efektivitas pelaksanaan prokes di Kota Palembang sangat bergantung pada kemampuan petugas untuk mengintegrasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh berbagai level pemerintahan dengan situasi nyata di lapangan.

## **Faktor Penghambat**

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Palembang mengalami kesulitan dalam bekerja sama dengan baik dalam penerapan protokol kesehatan (Prokes). Salah satu kendala utama dalam penegakan Prokes adalah lemahnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang berlaku.

Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengikuti protokol kesehatan masih rendah. Banyak individu yang tidak menganggap serius aturan kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesadaran yang kurang ini membuat penegakan Prokes menjadi lebih sulit, karena masyarakat cenderung mengabaikan peraturan dan tidak konsisten dalam mematuhi.

Oleh karena itu, masalah utama yang dihadapi dalam penegakan Prokes adalah rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan kesehatan. Edukasi yang lebih intensif dan kampanye kesadaran publik yang berkelanjutan mungkin dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan mempermudah pelaksanaan Prokes.

## **5. KESIMPULAN**

### **Evaluasi Kinerja Penegakan Protokol Kesehatan Oleh Anggota Posko Merdeka Di Masa Covid-19 Oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penanggulangan Bencana Kota Palembang**

#### **1. Terfokus pada nilai**

Dalam penerapan Prokes sendiri dalam satuan gabungan dari beberapa unsur dan instansi, memiliki beberapa kelemahan, pertama dari sisi masyarakat sendiri yang memang menganggap remeh soal virus Corona, kemudian dari petugas sendiri masih minim pengetahuan dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya untuk patuh pada protokol kesehatan.

#### **2. Fakta Nilai Terintepredensi**

Dalam penegakan prokes tidak berjalan dengan sesuai harapan, atas kebijakan prokes itu sendiri, karena disebabkan ada beberapa aspek, dimana masyarakat pada faktanya tidak semua mempercayai adanya virus corona, bahkan sebagian mengatakan bahwa corona ini hanyalah konspirasi politik dan semacamnya, sehingga petugas mengalami kesulitan dalam penegakan prokes.

### **3. Berorientasi Pada Masa Lalu Dan Sekarang**

Pada tahun 2020-2021 kebijakan prokes cukup berjalan dengan baik, masyarakat masih memiliki rasa takut dan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona, namun dalam perjalanan waktu dan di dukung masyarakat yang sudah vaksin 1 dan 2, membuat masyarakat merasa sudah lebih aman, sehingga ketaatan yang simple memakai masker saja sudah tidak ditaati lagi, belum lagi hal-hal yang lain seperti mencuci tangan dan sebagainya.

### **4. Dualitas Nilai**

Dalam penerapan kebijakan Prokes ini memiliki banyak kendala dan sisi yang masih lemah, lemah adalah kesadaran masyarakat serta pro dan kontra mengenai ada tidaknya virus corona, sehingga sebagian masyarakat tidak taat pada aturan yang berlaku, dan hal ini mempersulit petugas dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan. Maka dalam hal ini petugas harus memiliki teknik atau cara yang tepat sehingga dalam proses pelaksanaannya bisa lebih mudah.

### **Faktor Pendukung Dan Penghambat**

#### **1. Faktor Pendukung**

Kemampuan untuk adaptasi dan kerjasama tim sangatlah penting, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan prokes melibatkan banyak pihak, yang berasal dari unsur dan Lembaga yang berbeda-beda, namun dengan kerjasama yang baik menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan penegakan prokes. Kemudian petugas prokes dalam hal ini yang melibatkan dari Dinas Damkar Pos Merdeka, memiliki kekuatan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah baik dari pemerintah Pusat maupun daerah untuk memperkuat dan memperlancar kegiatan prokes yang ada di Kota Palembang.

#### **2. Faktor Penghambat**

Dalam penegakan Prokes masih mengalami kendala hal ini disebabkan karena kondisi masyarakat yang kurang memiliki kesadaran akan taat pada aturan hukum dan yang berlaku, oleh karena itulah aspek penting yang menjadi kendala adalah persoalan kesadaran masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

A.A Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). Manajemen Sumber daya Manusia. Perusahaan. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Abdullah, Rozali. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Kepala Daerah. Secara Langsung. Jakarta: PT Raja Grafindo.

- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Geovernance Melalui. Pelayanan Public*. Yogyakarta: UGM Press
- Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *DASAR-DASAR PENELITIAN KUALITATIF, Prosedur, Teknik dan Teori Grounded*. Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Assidiq dan Wirdarsi.2015. *Eksplorasi Perilaku Pemilih Muda Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2015 Melalui Pendekatan Konsep Trust And Distrust*.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- E.St Harahap, dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: BalaiPustaka.
- Hadari Nawawi & Martini Hadari .2004. *Kepemimpinan yang Efektif*.  
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Universitas. Sebelas Maret Press
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam. Pengelolaan Lingkungan*, Jakarta: Walhi.
- Hessel, Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja sektor publik*. yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Mathis.L.Robert dan Jackson.H.John. 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia,.* Jakarta :  
Buku kedua
- Moleong, Lexy J, 2007 . *Metode Pendidikan Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta:UI Press.
- Mulyana, Dedy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*, Bandung: Remaja Rosydakarya.
- Notoatmodjo, Soekidjo, 2003, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT. Rineka Cipta*
- Prihatmoko, 2003, *Pemilihan Kepala daerah Langsung*, Penerbit Pustaka Pelajar
- Prihatmoko, Moesafa Joko J., 2008. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*.  
Yogyakrta:Pustaka Belajar.

Sedarmayanti, 2001. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju, Bandung.

Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Fakultas Ekonomi. Universitas Indonesia

Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Edisi ketiga. Jakarta: PT.Raja Grafindo Prasada

Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Balairiung.

### **Peraturan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 8 Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 354)

Peraturan Pemerintah Nomor 114 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota

Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10)

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 12. Peraturan Walikota Palembang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Strategi Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemadam Kebakaran Di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang.